

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penangan Kecurangan Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud)
- Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.46 tahun 2017 Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2016, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan*. Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta.
- Aulia, P. (2020) 'Pengutan Peran Tim Pencegahn Kecurangan JKN di Daerah untuk Kendalikan Fraud, Policy Brief', *Pancanaka*, 1(2), p. 14.
- KESEHATAN, B. (2022) Rekapitulasi at: <https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/aplicares/#/app/peta>.
- Latifah, L. (2022) 'Laporan PKL II BKES Malang_Gelombang 1'.
- Moleong (2017) 'Moleong', *Fenomena Penelitian*, Bab iii me(April 2021), pp. 1–

9.

Nizar Fathurrohman (2018) 'Potensi Fraud pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nganjuk', 4(1), pp. 88–100.

Nurbaiti; Surachmad, S. Susmono, H. (2013) 'Fraud Pelayanan Kesehatan', Pamjaki, p. 163.

Rizki (2020) 'potensi fraud JKN pada PKM', pp. 1–22.

Rokom (2016) 'Kuatkan Layanan Kesehatan, Pemerintah Lakukan Lima Upaya Secara Simultan', Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa [Preprint]. Available at:

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20161104/2918732/kuatkan-layanan-kesehatan-pemerintah-lakukan-lima-upaya-secara-simultan/>.

Puti Aulia Rahma (2019), Evaluasi Sasaran Peta Jalan JKN dengan Pendekatan Realist 2018, Penelitian Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.